

PERAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DI KABUPATEN SUMEDANG

Muhammad Farhan Fachrian¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Harky Ristala³⁾

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu melalui berbagai aspek, termasuk responsivitas, kolaborasi, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Dalam aspek responsivitas, Dinas Pendidikan menunjukkan kemampuan dalam menanggapi permasalahan pendidikan secara cepat, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan keterbatasan anggaran. Pada aspek kolaborasi, pendekatan berbasis *pentahelix* diterapkan dengan melibatkan akademisi, sektor bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Untuk memastikan kualitas tenaga pendidik, Dinas Pendidikan menerapkan program pelatihan, sertifikasi, serta pengukuran kinerja berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), meskipun distribusi guru masih belum merata. Sementara itu, dalam pengelolaan sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan berupaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, namun masih menghadapi kendala keterbatasan dana sehingga pemerataan dilakukan secara bertahap. Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang terus berupaya memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, dengan berbagai kebijakan dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan yang ada di daerah.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan, pelayanan pendidikan, responsivitas, kolaborasi, tenaga pendidik, sarana dan prasarana.

Abstract

The Sumedang Regency Education Office plays a strategic role in ensuring quality education services through various aspects, including responsiveness, collaboration, teacher quality improvement, and infrastructure management. In terms of responsiveness, the Education Office demonstrates the ability to address educational issues promptly, although challenges remain in coordination and budget constraints. In the aspect of collaboration, a pentahelix approach is implemented, involving academics, businesses, communities, government, and media to support educational quality improvement.

To ensure the quality of educators, the Education Office implements training programs, certification, and performance measurement based on Key Performance Indicators (KPI), although teacher distribution remains uneven. Meanwhile, in

infrastructure management, efforts are made to enhance educational facilities, but financial limitations pose challenges, requiring a phased approach to equitable distribution. Overall, the Sumedang Regency Education Office continues to strive for quality education services through policies and strategies tailored to local needs and challenges.

Keywords: Education Office, education services, responsiveness, collaboration, teachers, infrastructure.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini tidak hanya menegaskan pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana strategi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa negara memikul tanggung jawab penuh dalam menyediakan akses pendidikan yang layak, adil, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan, tanpa diskriminasi terhadap latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Dengan demikian, pendidikan bukan semata-mata menjadi urusan individu, tetapi merupakan mandat konstitusional yang menuntut peran aktif pemerintah dalam menentukan kebijakan, menyelenggarakan layanan, serta menjamin keberlangsungan sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkemampuan

Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan memiliki peranan yang cukup penting sebagai sarana utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan memiliki karakter yang kuat. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, peningkatan mutu layanan pendidikan menjadi bagian krusial dari kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Peran ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau kurang terlayani.

Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk terus mendorong peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang kontekstual. Tidak kalah penting, pendidikan yang diselenggarakan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal serta mampu merespons dinamika dan tantangan global yang terus berkembang, seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan transformasi dunia kerja. Dengan demikian, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam membentuk sistem pendidikan yang adaptif, relevan, dan berkelanjutan.

Seiring dengan diterapkannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, memiliki wewenang yang besar dalam pengelolaan sektor pendidikan. Hal ini menempatkan Dinas Pendidikan sebagai institusi kunci dalam menjamin akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Salah satu daerah yang sedang berupaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas adalah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai permasalahan pendidikan, seperti ketimpangan distribusi guru, keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil, serta angka putus sekolah yang relatif tinggi. Misalnya, pada tahun 2022, tingkat putus sekolah di tingkat SD mencapai 0,55%, menjadikan Sumedang sebagai salah satu kabupaten dengan angka putus sekolah tertinggi di Jawa Barat. Meskipun demikian, survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menunjukkan angka kepuasan sebesar 92,95%, yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai kesenjangan antara persepsi pelayanan dan kenyataan di lapangan.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Fokus kajian diarahkan pada empat dimensi peran pemerintahan menurut Ryaas Rasyid, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Dengan

pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami tantangan serta strategi kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh fenomena yang diteliti. Fokus utama penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) mengenai peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam upayanya mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini, peneliti berupaya menggali dinamika peran institusi tersebut tidak hanya dari sisi formal kelembagaan, tetapi juga dari segi implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dengan fokus kajian pada implementasi empat fungsi utama yang bersifat strategis, yaitu regulasi, fasilitasi, dinamisasi, dan katalisasi, dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas. Fungsi-fungsi tersebut menjadi dasar analisis untuk menilai sejauh mana peran Dinas Pendidikan sebagai lembaga kunci dalam pengelolaan pendidikan daerah dapat dijalankan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana institusi tersebut mengarahkan kebijakan, memberikan dukungan, mendorong perubahan, serta menjembatani kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji beragam kendala dan potensi yang memengaruhi pelaksanaan keempat fungsi tersebut, baik dari segi internal organisasi maupun faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat, ketersediaan sumber daya, serta tingkat keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh tentang kapasitas dan efektivitas peran Dinas

Pendidikan dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumedang.

Informan dipilih secara purposive, terdiri dari pejabat struktural Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, serta perwakilan masyarakat yang relevan dengan isu mutu pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi kebijakan dan laporan tahunan Dinas Pendidikan. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kebijakan serta implementasi pelayanan pendidikan. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah Sumedang kota dan kecamatan dengan fasilitas pendidikan yang masih terbatas, guna membandingkan mutu pelayanan secara geografis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, data yang diperoleh disaring dan dikonsentrasikan agar lebih mudah dipahami dan dikelola.

Selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik agar memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkelanjutan untuk memastikan validitas temuan penelitian (Miles & Huberman, 1994). Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber dan metode (Sugiyono, 2017).

Model analisis dalam penelitian ini mengacu pada empat peran pemerintah menurut teori Ryaas Rasyid, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator (Rasyid, 2002). Keempat dimensi ini digunakan sebagai kategori analisis untuk menilai sejauh mana kinerja Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan gambaran utuh mengenai peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Temuan penelitian ini tidak hanya menjelaskan fungsi kelembagaan secara normatif, tetapi juga menggambarkan implementasinya dalam konteks nyata di lapangan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih sistematis, Hasil tersebut diklasifikasikan berdasarkan empat dimensi peran pemerintahan yang sesuai dengan Teori Ryaas Rasyid: regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator.

1. Peran Sebagai Regulator

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah menjalankan perannya secara optimal sebagai pembuat kebijakan (regulator) dalam sektor pendidikan dengan merumuskan berbagai rencana strategis dan kebijakan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Salah satu fokus utama dari kebijakan tersebut adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, yang diwujudkan melalui program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi guru, serta pembinaan secara periodik.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga berperan aktif dalam memperkuat implementasi kurikulum dengan melakukan penyesuaian yang responsif terhadap kebutuhan lokal serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk penyusunan materi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial, budaya, serta potensi sumber daya di Kabupaten Sumedang.

Langkah ini tidak hanya berperan penting dalam mendukung pencapaian standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga menjadi landasan kokoh bagi terciptanya proses pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan aplikatif bagi peserta didik. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan kemampuan kritis,

kreatif, dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata, sehingga mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan secara lebih optimal. Dengan demikian, kurikulum yang diimplementasikan mampu memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu mempersiapkan peserta didik secara komprehensif untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika di tingkat nasional maupun global, sehingga mereka siap bersaing dan berkontribusi secara positif di masa depan.

Upaya tersebut menunjukkan komitmen kuat institusi dalam merumuskan dan mengarahkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat daerah secara menyeluruh. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, peran regulatif ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama masalah ketimpangan persebaran tenaga pendidik antar kecamatan yang menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Kondisi ini menuntut langkah strategis lebih lanjut agar kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga tujuan peningkatan kualitas pembelajaran dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah.

Ketidakseimbangan ini bisa terlihat jelas dalam jumlah rasio guru terhadap siswa yang tidak merata di Kabupaten Sumedang, seperti yang tercermin dari perbandingan antara Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Sumedang Selatan, di mana wilayah kecamatan Sumedang Selatan mengalami kelebihan jumlah tenaga guru atau pendidik sementara wilayah Kecamatan Tanjungsari justru mengalami kekurangan tenaga pendidik sedangkan jumlah siswa dan siswi pada wilayah Kecamatan Tanjungsari memiliki jumlah siswa dan siswi yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Sumedang Selatan, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Rasio Guru dan Siswa di Dua Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Rasio Siswa/Guru
Tanjungsari	14.087	562	25 : 1
Sumedang Selatan	12.819	731	17 : 1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2023)

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah disusun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal manajemen distribusi tenaga pendidik yang berkeadilan dan berbasis kebutuhan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar peran sebagai regulator dapat dijalankan secara lebih efektif dan merata.

2. Peran Sebagai Dinamisor

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah menginisiasi berbagai program dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya melalui pelatihan guru, partisipasi dalam program Guru Penggerak, serta penyelenggaraan workshop penguatan kompetensi digital. Program-program tersebut bertujuan untuk mendorong inovasi pembelajaran, meningkatkan kapasitas profesional tenaga pendidik, dan menjawab tantangan pendidikan di era digital. Namun demikian, implementasi program-program tersebut masih menghadapi kendala dalam hal pemerataan akses, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau pinggiran.

Guru-guru yang bertugas di daerah pelosok mengungkapkan bahwa mereka jarang terlibat langsung dalam kegiatan pelatihan, salah satunya disebabkan oleh lokasi pelatihan yang jauh dari tempat tugas serta terbatasnya sarana transportasi dan infrastruktur pendukung. Kondisi ini mencerminkan bahwa peran Dinas Pendidikan sebagai dinamisor, yakni penggerak inovasi dan perubahan dalam sistem pendidikan, belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh satuan pendidikan secara merata.

Ketimpangan ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kondisi geografis yang menyulitkan mobilitas guru serta terbatasnya alokasi anggaran yang belum mampu mendukung pelaksanaan program secara inklusif hingga ke wilayah terluar. Hambatan seperti akses jalan yang sulit, jarak tempuh yang jauh, dan minimnya transportasi membuat guru di daerah pinggiran kesulitan mengikuti pelatihan atau kegiatan pengembangan profesional.

Sementara itu, keterbatasan anggaran seringkali memaksa pemerintah daerah untuk memfokuskan pelaksanaan program di wilayah-wilayah yang lebih mudah dijangkau dan memiliki infrastruktur yang memadai. Kondisi ini secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan akses terhadap inovasi pendidikan antara daerah yang terjangkau dengan daerah yang lebih terpencil. Akibatnya, peluang untuk menikmati berbagai pembaruan dan peningkatan mutu pendidikan menjadi tidak merata, sehingga sebagian guru dan peserta didik di wilayah kurang berkembang terpinggirkan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap karakteristik serta kebutuhan spesifik tiap wilayah. Strategi ini harus berbasis pada pendekatan desentralisasi yang melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan lokal—seperti kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, dan dinas terkait—agar dinamika inovasi pendidikan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, diharapkan peningkatan mutu pendidikan tidak hanya terjadi di pusat-pusat kota, melainkan juga merata hingga ke pelosok kecamatan, menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Peran Sebagai Fasilitator

Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah berupaya mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas serta pengadaan alat peraga pembelajaran. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Namun, temuan hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah terpencil masih menghadapi berbagai keterbatasan. Beberapa di antaranya meliputi kekurangan ruang kelas, kondisi di mana satu guru menangani lebih dari satu kelas secara bersamaan, hingga penggunaan fasilitas belajar yang tidak layak pakai karena mengalami kerusakan atau tidak sesuai standar. Hal ini menandakan bahwa distribusi fasilitas pendidikan belum berjalan secara

merata. Padahal, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor krusial dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif serta dalam menjamin pencapaian kompetensi siswa secara setara di seluruh wilayah. Ketimpangan dalam aspek ini dapat menjadi penghambat serius dalam pencapaian pemerataan mutu pendidikan, sehingga menuntut perhatian lebih dalam perencanaan dan alokasi sumber daya pendidikan yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

4. Peran Sebagai Katalisator

Model kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media telah diterapkan dalam beberapa program, seperti pemberian beasiswa melalui CSR dan pelatihan yang berbasis komunitas. Namun, keterlibatan aktor non-pemerintah masih bersifat terbatas dan belum menjadi bagian dari sistem yang terorganisir dan berkelanjutan. Keberhasilan peran sebagai katalisator menuntut adanya koordinasi yang terus menerus, pembagian peran yang jelas antar pihak, serta evaluasi yang didasarkan pada hasil nyata. Saat ini, peran tersebut masih sangat bergantung pada inisiatif individu dan belum didukung sepenuhnya oleh kebijakan yang mengikat serta mekanisme formal.

Berdasarkan hasil di atas, terlihat bahwa peran Dinas Pendidikan telah berjalan pada tingkat tertentu namun belum optimal. Ketimpangan guru, fasilitas, dan akses inovasi masih menjadi isu krusial. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sejenis di daerah lain, seperti di Kabupaten Aceh Tenggara dan Lanny Jaya, yang menunjukkan peran Dinas Pendidikan cenderung terkendala pada aspek implementasi dan penyebaran sumber daya (Desky, 2022; Kogoya, 2017).

Secara umum, temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan peran pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu ketersediaan dana, kemampuan institusi, dan kondisi geografis. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sudah menerapkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, tetapi masih terdapat kesenjangan antara kebijakan tersebut dengan pelaksanaan di lapangan yang perlu diperbaiki.

Dengan demikian, hipotesis bahwa “Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan bermutu, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis” dapat dibenarkan. Namun, perlu ditekankan bahwa pelayanan pendidikan yang bermutu belum tersebar merata di seluruh kecamatan, sehingga memerlukan upaya perbaikan yang terus menerus dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan pendidikan berkualitas melalui pelaksanaan fungsi-fungsi utama sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Peran tersebut terealisasi melalui berbagai kebijakan dan program, seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala signifikan, seperti ketidakmerataan distribusi tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas di daerah terpencil, dan anggaran yang terbatas sehingga menghambat pemerataan mutu pendidikan. Hal ini menandakan bahwa meskipun kebijakan sudah sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang berkualitas, pelaksanaannya belum berjalan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan, peningkatan sinergi antar sektor, serta penyusunan strategi jangka panjang yang sesuai dengan kondisi lokal menjadi hal penting untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang inklusif dan adil di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusven, D., Hanafiah, R., & Rosnita, R. (2018). *Manajemen Pelayanan Pendidikan*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Desky, P. T. S. (2022). Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 10(2), 150–161.
- Kogoya, S. G. A. (2017). Peran Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pelayanan dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 43–57.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Polla, R. (2018). Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 114–123.
- Rasyid, R. (2002). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Administrasi*. Yogyakarta: Liberty.

- Rahmadana, R. (2020). Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 75–84.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R\&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, H. (2011). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.